



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 26 Februari 2019

Halaman: 9

Parkir Tepi Jalan Bisa Terapkan Retribusi Nontunai

UMBULHARJO (MERAPI) - Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) secara nontunai dari retribusi diusulkan diperluas ke parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Penerimaan retribusi secara non tunai itu dinilai bisa meminimalisir potensi kebocoran PAD. Hal itu mempertimbangkan penerimaan retribusi nontunai di dua pasar tradisional dinilai transparan dan menekan potensi kebocoran.

"Kami melihat program penerimaan retribusi pasar secara nontunai adalah inovasi yang baik karena manfaatnya banyak. Jadi ke depan kami mendorong itu juga bisa diterapkan pada retribusi parkir TJU," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoir, Senin (25/2).

Menurutnya, dalam rapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga dibahas terkait penerimaan retribusi pasar secara nontunai dan pencatatan pembayaran dengan quick response (QR) code. Menurutnya program penerimaan nontunai memudahkan para pedagang membayar dan mengurangi kebutuhan petugas pemungut retribusi. Penerimaan retribusi non tunai juga langsung masuk ke kas daerah.

"Penerimaan retribusi secara non tunai juga meminimalkan potensi kehilangan retribusi akibat *human error*. Jika itu diterapkan pada retribusi parkir TJU bisa mengatasi keluhan masyarakat terkait penarikan tarif parkir yang melebihi ketentuan. Ada kepastian retribusi parkir dibayar sesuai aturan perda," ucapnya.

Namun untuk menerapkan retribusi parkir nontunai diakuinya memerlukan aturan teknis. Dia menyatakan aturan teknis itu berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam perparkiran. Penerapannya pada tahap awal bisa dilakukan pada titik-titik jalan tertentu.

"Pembayaran bisa memakai kartu parkir yang bisa ditop-up di kanal-kanal umum yang tersedia. Kalau tidak punya kartu, pengguna jasa parkir bisa dibantu petugas yang jaga, tapi sifatnya kondisional dan dibatasi," papar Nasrul.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta yang sudah memiliki aplikasi Jogja Smart Service (JSS) harusnya juga bisa lebih dikembangkan. Misalnya ada semacam kartu yang bisa dipakai untuk kebutuhan pelayanan pembayaran.

Sebelumnya pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan sudah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Yogyakarta yang menghasilkan PAD diminta menyusun peta rencana penerimaan secara non tunai. Beberapa OPD sudah menerapkan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan. BPKAD selama ini juga telah menerapkan pada penerimaan pajak PBB, restoran, hiburan dan parkir.

"Tahun 2019 belanja semua nontunai. Nanti di 2020 penerimaan pendapatan secara non tunai akan lebih banyak diimplementasikan," imbuhnya.

Diakuinya ada beberapa penerimaan pendapatan di sebagian OPD yang mengalami hambatan untuk diterapkan secara nontunai. Misalnya retribusi rumah pemotong hewan, bibit tanaman dan hewan, sampah, limbah dan puskesmas.

Untuk itu pihaknya mempertimbangkan dalam mekanisme penerimaan pendapatan secara non tunai di OPD terkait. Misalnya batasan nominal penerimaan pendapatan secara non tunai. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat S
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005